



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (L K P j) TAHUN 2024



Dinas Lingkungan Hidup

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPj, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dalam kaitan dengan hal ini, bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024. LKPj Dinas Lingkungan Hidup ini juga merupakan informasi Capaian pelaksanaan Kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LKPj Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Benteng, Januari 2025
KEPALA DLH,



MUH. TAUFIK KADIR, ST.,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19720303 200604 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural..	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	8
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	31
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	32
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....	34
2.1.5. Inovasi.....	35
2.1.6. Prestasi / Penghargaan.....	36
2.2. Kebijakan daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.....	37
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024.....	38
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Tugas Pembantuan & Penugasan Yang Dilaksanakan	39
3.2. Hambatan hambatan.....	39
BAB IV : PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan	4
Tabel 2. Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan	5
Tabel 3. Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat.....	5
Tabel 4. Klasifikasi PNS Berdasarkan Jabatan.....	6
Tabel 5. Capaian Kinerja Program & Kegiatan DLH tahun 2024.....	8
Tabel 6. Capaian Kinerja IKU DLH Tahun 2024.....	31
Tabel 7. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada DLH.....	33
Tabel 8. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yg sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja...	34
Tabel 10. Inovasi	35
Tabel 11. Prestasi dan Penghargaan	36
Tabel 12. Kebijakan Strategis DLH Tahun 2024	37
Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum DLH



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 35, Benteng Selayar, 92812 Sulawesi Selatan. Telepon (0414) 21263, Email: dislhksly@gmail.com. Berada pada titik koordinat 6°07'21.6"S 120°27'33.3"E. Adapun Susunan dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup yaitu Tipe B adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretaris
3. 3 (tiga) Bidang
4. 3 (tiga) Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai Berikut:

1. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan

Fungsional;

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian-subbagian yang berada di dalam sekretariat masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sementara itu, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Seksi-seksi yang ada di dalam tiap bidang, bertanggung jawab secara langsung kepada masing-masing Kepala Bidang.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada tahun 2024 sebanyak 31 Orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 Orang dan Perempuan sebanyak 17 Orang dengan Klasifikasi menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 01. Klasifikasi PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	1	4	5
STRATA 1	5	12	17
DIPLOMA 4	0	0	0
DIPLOMA 3	0	2	2
DIPLOMA 2	0	0	0
DIPLOMA 1	0	1	1
SLTA	6	0	6
SLTP	1	0	1
Jumlah	13	18	31

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 01 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- ✓ S2 = 5 Orang
- ✓ S1 = 17 Orang
- ✓ D III = 2 Orang
- ✓ D I = 1 Orang
- ✓ SLTA = 6 Orang
- ✓ SLTP = 1 Orang

Tabel 02. Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	1	0	1
II	5	1	6
III	6	12	18
IV	2	4	6
Jumlah	14	17	31

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 02 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- ✓ Golongan I = 1 Orang
- ✓ Golongan II = 6 Orang
- ✓ Golongan III = 18 Orang
- ✓ Golongan IV = 6 Orang

Tabel 03. Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat

Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina	1	4	5
Pembina Tk.I	1	0	1
Penata Muda	2	0	2
Penata Muda Tk.I	0	2	2
Penata	0	3	3
Penata Tk.I	3	8	11
Pengatur Muda	0	0	0
Pengatur Muda Tk.I	0	0	0
Pengatur	2	0	2
Pengatur Tk.I	3	1	4
Juru Muda	0	0	0
Juru Muda Tk.I	0	0	0
Juru	1	0	1
Jumlah	13	18	31

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 02 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pangkat adalah sebagai berikut:

- ✓ Pembina = 5 Orang
- ✓ Pembina Tk.I = 1 Orang

- ✓ Penata Muda = 2 Orang
- ✓ Penata Muda Tk.I = 2 Orang
- ✓ Penata = 3 Orang
- ✓ Penata Tk.I = 11 orang
- ✓ Pengatur = 2 Orang
- ✓ Pengatur Tk.I = 4 Orang
- ✓ Juru = 1 Orang

Sedangkan untuk Jumlah Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 04. Klasifikasi PNS Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II/b	1	0	1
Eselon III/a	1	0	1
Eselon III/b	0	3	3
Eselon IV/a	0	4	4
Eselon IV/b	0	1	1
Fungsional	4	6	10
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	6
Operator Layanan Operasional	2	0	2
Jumlah	14	17	31

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja atau disebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjanya untuk seluruh indikator kinerja yang adadiharapkan dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 05. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,28	103 146,56%			
					Alokasi Anggaran : Rp4.916.906.100	Realisasi Anggaran: Rp 4.705.982.867			
						95,71%			
				Keg : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp9.294.200	Realisasi Anggaran: Rp 7.151.900			
						76,95%			
		Sub Kegiatan :							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3 100%					
			Alokasi Anggaran : Rp1.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 770.700					
						77,07%			

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp1.000.000	Rp 770.700			
						77,07%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp2.000.000	Rp 1.541.400			
						77,07%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	1			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						77,07%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	1			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp2.294.200	Rp 1.757.000			
						76,58%			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 1.000.000	Rp 770.700	77,07%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 1.000.000	Rp 770.700	77,07%			
				Keg : Administasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 3.056.923.000	Rp 2.892.333.748	94,62%			
				Sub Kegiatan :						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35	35	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 3.051.100.000	Rp 2.887.671.648	94,64%			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	89,74%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700	77,07%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	12	12	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 3.823.000	Rp 3.120.700	81,63%		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700	77,07%		
				Keg : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 2.000.000	Rp 1.541.400	77,07%		
				Sub Kegiatan :					

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						100%			
						77,07%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						100%			
						77,07%			
				Keg : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	85,71	85,71			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 164.186.400	Rp163.529.400			
						100%			
						99,60%			
				Sub Kegiatan :					
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 796.000			
						100 %			
						79,60%			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	1			
						100%			

					Alokasi Anggaran : Rp 162.186.400	Realisasi Anggaran: Rp 161.957.100 99,86%			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp 1.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 776.300 77,63%			
				Keg : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp 21.685.000	Realisasi Anggaran: 20.379.100 93,98%			
				Sub Kegiatan :					
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp 3.240.000	Realisasi Anggaran: Rp 2.636.700 100%			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	2 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp 4.254.000	Realisasi Anggaran: Rp 4.204.000 81,38%			

			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	100%			
				Alokasi Anggaran : Rp 2.445.000	Realisasi Anggaran: Rp 1.971.700	80,64%			
			Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	10	100%			
				Alokasi Anggaran : Rp 15.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 15.000.000	100%			
			Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%			
				Alokasi Anggaran : Rp 212.186.100	Realisasi Anggaran: Rp 211.893.500	99,86%			
			Sub Kegiatan :						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100%			
				Alokasi Anggaran : Rp 997.300	Realisasi Anggaran: Rp 727.000	77,90%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	100%			
				Alokasi Anggaran : Rp 4.243.800	Realisasi Anggaran: Rp 4.221.000	99,46%			

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3	3	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	182	133,82%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 204.845.000	Rp 204.845.000	100%			
				Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,33	33,33	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 21.940.000	Rp 21.400.000	97, 54%			
				Sub Kegiatan :			100%			
				Pengadaan Mebel	2	2	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 4.300.000	Rp 3.900.000	90,70%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:				
					Rp 17.640.000	Rp 17.500.000	99,21%			

				Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 223.671.400	Rp 212.443.189			
						94,98%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 6.489.900	Rp 5.305.400			
						100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 6.2541.500	Rp 57.876.989			
						94,14%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp.154.640.000	Rp 148.260.800			
						95,87%			
				Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,31	16,31			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.205.020.000	Rp 1.175.311.130			

						97,53%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	14	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 63.445.000	Rp 60.895.490	95,98%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	36	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1,060.875.000	Rp 1.033.759.140	97,44%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1	1	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 56.250.000	Rp 56.250.000	100%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9	9	100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 9,250.000	Rp 9,220.000	99,68%		

				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp106.800.000	Realisasi Anggaran: Rp106.720.000 99,93%			
				Program Perencanaan Lingkungan	25	23			
					Alokasi Anggaran : Rp 501.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 496.713.945 99,14%			
				Keg : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab./Kota	28	28			
					Alokasi Anggaran : Rp 351.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 347.464.500 98,99%			
				Sub Kegiatan :					
				Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1	1			
					Alokasi Anggaran : Rp 350.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 346.693.800 99,06%			
				Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1	1			
					Alokasi Anggaran : Rp 1.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 770.700 77,07%			
				Keg : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	79,05	79,05			
						100%			

				Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Alokasi Anggaran : Rp 150.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 149.249.445 99,50%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	1	1 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp 150.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 149.249.445			
						99,50%			
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,59	3,91 151%			
					Alokasi Anggaran : Rp 544.643.900	Realisasi Anggaran: Rp 536.832.870			
						98,57%			
				Keg : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,59	2,59 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp 223.643.900	Realisasi Anggaran: Rp 218.215.170 97,57%			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	16	16 100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			

			Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						77,07%		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 Alokasi Anggaran : Rp 17.406.000	3 100 % Realisasi Anggaran : Rp 15.996.700			
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	1 Alokasi Anggaran : Rp 205.237.900	1 100% Realisasi Anggaran: Rp 201.447.770			
			Keg : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10 Alokasi Anggaran : Rp650.800.600	8,88 88,80% Realisasi Anggaran: Rp 648.068.500			
			Sub Kegiatan :					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kab/Kota	1 Alokasi Anggaran :	1 100% Realisasi Anggaran:			

					Rp1.000.000	Rp 770.700			
						77,07%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	1			
						372%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 200.000.000	Rp 199.003.500			
						99,50%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	1			
						33,50%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 120.000.000	Rp 118.843.500			
						99,04%			
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,38	1,39			
						100,72%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.613.408.700	Rp 1.603.666.065			
						99,40%			
				Keg : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2,31	2,31			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.558.416.800	Rp 1.549.399.460			
						99,42%			
				Sub Kegiatan :					
				Pengelolaan Taman	3	3			

				Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		234%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						77,70%			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20	20			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.610.408.200	Rp 1.601.124.665			
						99,62%			
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3	5			
						167%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						77,70%			
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	5	5			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 1.000.000	Rp 770.700			
						77,70%			
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	100			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 2.014.000	Rp 1.904.000			
						94,50%			

				Keg : Penyimpanan Sementara Limbah B3	9,25	9,25			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 2.014.000	Rp 1.904.000			
						94,50%			
				Sub Kegiatan :					
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1	14			
						1400%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 2.014.000	Rp 1.904.000			
						94,50%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	66,00	110			
						167%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 3.000.000	Rp 3.000.000			
						100%			
				Keg : Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	16,67	16,67			
						100%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp 3.000.000	Rp 3.000.000			
						100%			

				Pengelolaan Lingkungan Hidup.					
				Sub Kegiatan :					
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah	3	5	167%		
					Alokasi Anggaran : Rp 3.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 3.000.000	100%		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	23,08	20,40	86,65%		
					Alokasi Anggaran : Rp 8.300.000	Realisasi Anggaran: Rp 7.786.400	97,26 %		
				Keg : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%		
					Alokasi Anggaran : Rp 8.300.000	Realisasi Anggaran: Rp 7.786.400	97,26 %		
				Sub Kegiatan :					
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1	4	400%		
					Alokasi Anggaran : Rp 8.300.000	Realisasi Anggaran: Rp 7.786.400			

						97,26 %			
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33,33 Alokasi Anggaran : Rp 31.006.500	33,33 100% Realisasi Anggaran: Rp 30.155.500 97,26%			
				Keg : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Alokasi Anggaran : Rp 31.006.500	15 100% Realisasi Anggaran: Rp 30.155.500 97,26%			
				Sub Kegiatan :					
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 Alokasi Anggaran : Rp 31.006.500	20 100% Realisasi Anggaran: Rp 30.155.500 97,26%			
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Alokasi Anggaran : Rp1.000.000	100 100% Realisasi Anggaran: Rp 960.000 96 %			
				Keg : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 Alokasi Anggaran : Rp1.000.000	100 100% Realisasi Anggaran: Rp 960.000			

					96 %			
				Sub Kegiatan :				
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1	2 200%		
					Alokasi Anggaran : Rp1.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 960.000 96 %		
				Program Pengelolaan Persampahan	1,30	7,92 609%		
					Alokasi Anggaran : Rp 3.655.775.300	Realisasi Anggaran: Rp 3.648.041.669 99,79%		
				Keg : Pengelolaan Sampah	14,27	17,10 83,45%		
					Alokasi Anggaran : Rp 3.655.775.300	Realisasi Anggaran: Rp 3.648.041.669 99,79%		
				Sub Kegiatan :				
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3	21,92 730,66%		
					Alokasi Anggaran : Rp 216.351.200	Realisasi Anggaran: Rp 216.057.100 100%		
				Penanganan Sampah melalui Pemilahan	6000	4.404,60		

				dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS-3R, PDU, TPST,TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan perundangan		73,41%			
					Alokasi Anggaran : Rp 3.128.620.400	Realisasi Anggaran: Rp 3.127.488.400			
						99,96%			
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5	5			
					Alokasi Anggaran : Rp 2.000.000	Realisasi Anggaran: Rp 1.961.400			
						100%			
						98,07%			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	1	434			
					Alokasi Anggaran : Rp 308.803.700	Realisasi Anggaran: Rp 302.534.769			
						434%			
						97,97%			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2024, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 06. Capaian Kinerja IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Lingkungan Hidup					
	Dinas Lingkungan Hidup					
	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	56,00	52,22	93,25	Sangat Baik
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,59	94,56	110,48	Memuaskan
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	47,56	44,39	93,33	Sangat Baik
	4. Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	35,12	48,72	138,72	Memuaskan

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Udara adalah 110,48% (Memuaskan) dan Indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah adalah 138,72% (Memuaskan). Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, Indikator Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
2. Capaian Kinerja Indikator Indeks Tutupan Lahan (IKTL) adalah 93,33 (sangat baik) namun belum mencapai target yang diperjanjikan hal ini disebabkan karena terdapat titik yang dilaporkan tidak terverifikasi, Terdapat titik yang dilaporkan atau diinput yang tidak memiliki atau hanya sebagian yang terdapat tutupan vegetasi, Terdapat titik yang dilaporkan telah terhitung pada tutupan hutan/belukar dan titik koordinat yang dilaporkan tidak melampirkan atau melengkapi poligon/deliniasi.

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasinya. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup semakin baik apabila realisasinya semakin tinggi dan akan tidak baik pencapaian kinerjanya apabila semakin rendah realisasinya. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 07. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada DLH Tahun 2024

No	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	Urusan Lingkungan Hidup					
	Dinas Lingkungan Hidup					
	1. Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%	25	23	92	
	2. Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point	2,59	3,91	77,60	
	3. Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	1,38	1,39	100,72	
	4. Persentase Lembaga/Perusahaan Penghasil Limbah B3 yang diawasi (%)	%	100	100	100	
	5. Persentase Keatatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	%	66	110	167	
	6. Persentase MHA, Kearifan Lokal yang Terkait PPLH yang diakui keberadaannya	%	2,27	n/a	n/a	
	7. Persentase Lembaga masyarakat yang diberikan diklat	%	23,08	20,00	86,96	
	8. Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	%	33,33	33,33	100	
	9. Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	100	100	100	
	10. Persentase Pengelolaan Sampah yang Bernilai Ekonomi	%	1,3	7,9	607,69	

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berikut hasil Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 08. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Lingkungan Hidup								
	Dinas Lingkungan Hidup	11.277.055.300	11.035.043.316	242.011.984	97,85	10	108,94	20	

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.1.5 Inovasi

Pelaksanaan pembangunan dengan berbagai permasalahannya dapat diurai dengan berbagai inovasi. Inovasi dapat berupa menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dengan berdasarkan pada pemikiran dan tujuan untuk Peningkatan Pemberian Pelayanan Publik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup 2024

Tabel 09. Inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KET.
1.	<p>PELANGI (Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup Terpadu) merupakan inovasi dari reformer Andi Baharuddin untuk menyediakan platform terpadu bagi masyarakat dalam mengadukan permasalahan lingkungan hidup. Melalui PELANGI, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan berbagai masalah seperti pencemaran udara, air, atau limbah, serta kerusakan ekosistem kepada pihak berwenang. Sistem ini dirancang untuk memastikan respons cepat dan efisien terhadap setiap pengaduan, sehingga permasalahan lingkungan dapat segera diidentifikasi, diinvestigasi, dan ditangani secara tepat.</p>	<p>PELANGI juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya platform ini, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi dan merawat lingkungan semakin meningkat</p>	<p>Sebagai sarana untuk edukasi dan advokasi lingkungan, sehingga menciptakan kesadaran kolektif akan perlunya perlindungan dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang</p>	

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.1.5. Prestasi/Penghargaan

Tabel 10. Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan Oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sertifikat Adipura		√			Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.	Piagam Partisipasi Proklamasi		√			Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Strategis yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang diambil dalam satu tahun anggaran dituangkan ke dalam sebuah laporan. Laporan tentang kebijakan yang diambil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1.	Mengembangkan Iptek ramah lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	21 Tahun 2021 4 Januari 2021	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan 2. Mendukung tugas-tugas pemerintah daerah terutama penyediaan data kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup <p>Masalah yang diselesaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Data akurat uji kualitas lingkungan 	PERBUP

				hidup 2. Memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, pengawasan dan penyusunan program dibidang lingkungan hidup.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

(NIHIL)

4.2 Hambatan-Hambatan

(NIHIL)

BAB VI

PENUTUP

Pengukuran realisasi (capaian) kinerja yang dilakukan dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini, pada pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup serta pihak terkait lainnya. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Benteng, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Selayar,



MUH. TAUFIK KADIR, S.T.,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720303 200604 1 020

